

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang pada suatu bangsa. Pencapaian sasaran tersebut ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012-2017 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Pemberdayaan Perempuan, maka dalam periode 2012-2017 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas nasional bidang Pemberdayaan Perempuan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 sebagai berikut :

Program-program Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Program Generik (Dasar) dan Program Teknis.

A. Program Generik (Dasar)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

B. Program Teknis

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
3. Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Program Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana.
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tabel 5.1.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UNIT PELAKSANA
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mengoptimalkan kualitas manajemen yang akuntabel dan terintegrasi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	Optimalnya kualitas manajemen yang akuntabel dan terintegrasi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	Terlaksananya pelaksanaan urusan rumah tangga Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang dan jasa urusan rumah tangga														SEKRETARIS
																		Sub Bagian Kepegawaian
																		Sub Bagian Kepegawaian
																		SEKRETARIS
																		Sub Bagian Kepegawaian
																		SEKRETARIS
																		Sub Bagian Kepegawaian
																		SEKRETARIS
																		Sub Bagian Kepegawaian
																		SEKRETARIS
																		Sub Bagian Kepegawaian

Rencana Strategis BPPKBPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Revisi)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UNIT PELAKSANA
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Terlaksananya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		825.000.000		907.500.000		998.250.000		1.098.075.000		1.207.882.500		1.328.670.750		SEKRETARIS
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen keuangan sebanyak 4 dokumen (Laporan Realisasi Keuangan, Laporan Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan/CALK, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/LKPJ)	4	4	75.000.000	4	82.500.000	4	90.750.000	4	99.825.000	4	109.807.500	4	120.788.250	Sub Bagian Keuangan
			Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/LPPD, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP)	2	2	150.000.000	2	165.000.000	2	181.500.000	2	199.650.000	2	219.615.000	2	241.576.500	Sub Bagian Perencanaan
			Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Perempuan	1 Jumlah dokumen perencanaan dana dekonsentrasi yang dilengkapi dokumen PPRG	1	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	241.576.500	Sub Bagian Perencanaan
				2 Jumlah dokumen pelaporan keuangan dana dekonsentrasi (laporan realisasi)	1	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.500	1	120.788.250	Sub Bagian Keuangan
			Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur CPNS	25	25	-	30	-	30	-	40	-	40	-	40	-	Sub Bagian Kepegawaian
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Tersusunnya laporan keuangan setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)	1	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.500	1	120.788.250	Sub Bagian Keuangan
			Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran APBD (RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA yang dilengkapi dokumen PPRG, MUSRENBANG, RKA, DPA, DPPA).	7	7	300.000.000	7	330.000.000	7	363.000.000	7	399.300.000	7	439.230.000	7	483.153.000	Sub Bagian Perencanaan
		Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			975.000.000		1.072.500.000		1.179.750.000		1.297.725.000		1.427.497.500		1.570.247.250		SEKRETARIS
			Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah dokumen kebijakan pelaksanaan tugas teknis badan (Kesepakatan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan)	1	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	241.576.500	Sub Bagian Perencanaan
				Jumlah dokumen kebijakan pelaksanaan tugas teknis badan (Struktur Organisasi dan Uraian Tugas)	1	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.500	1	120.788.250	Sub Bagian Kepegawaian

Rencana Strategis BPPKBPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Revisi)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UNIT PELAKSANA
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) Dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat				293.429.500		822.425.000		904.667.500		995.134.250		1.094.647.675		1.204.112.443	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
		Persentase SKPD yang memiliki data terpilah																
		Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berbasis gender																
		Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)		Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender/PPRG sebanyak 55,81% (24 dari 43 SKPD)	2,3% (1 dari 43 SKPD)	4,6% (2 dari 43 SKPD)	64.105.000	39,53% (17 dari 43 SKPD)	549.425.000	46,51% (20 dari 43 SKPD)	604.367.500	51,16% (22 dari 43 SKPD)	664.804.250	55,81% (24 dari 43 SKPD)	731.284.675	55,81% (24 dari 43 SKPD)	804.413.143	Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
		Penyediaan Data Terpilah		Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 23,2% (10 dari 43 SKPD (BPPKBPA, Diknas, Dinkes, Disos, Disnakertrans, BKD, Dinas Koperasi & UMKM, Dispora, DPRD, Disperindag), dan 7 instansi vertikal (Kemen PP&PA, Polda, Kemenag, BPS, Kantor Hukum &	16,3% (7 dari 43 SKPD), & 7 Instansi Vertikal	16,3% (7 dari 43 SKPD) & 7 Instansi Vertikal	117.948.500	18,6% (8 dari 43 SKPD) & 7 Instansi Vertikal	150.000.000	18,6% (8 dari 43 SKPD) & 7 Instansi Vertikal	165.000.000	21% (9 dari 43 SKPD) & 7 Instansi Vertikal	181.500.000	23,2% (10 dari 43 SKPD) & 7 Instansi Vertikal	199.650.000	23,2% (10 dari 43 SKPD) & 7 Instansi Vertikal	219.615.000	Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
		Penguatan Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan		Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berbasis gender	33,33% (11 dari 33 lembaga)	33,33% (11 dari 33 lembaga)	111.376.000	36,36% (12 dari 33 lembaga)	123.000.000	39,39% (13 dari 33 lembaga)	135.300.000	42,42% (14 dari 33 lembaga)	148.830.000	45,45% (15 dari 33 lembaga)	163.713.000	45,45% (15 dari 33 lembaga)	180.084.300	Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

Rencana Strategis BPPKBPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Revisi)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UNIT PELAKSANA
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan disegala bidang Pembangunan	Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, peran serta posisi perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan															Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
		Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA																Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Perempuan
		Persentase perempuan di lembaga pemerintahan	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase perempuan di lembaga pemerintahan	Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA		0%	0%	226.891.000	2,26% (7 Klmp dari 309 Klmp)	306.000.000	336.600.000	13,59% (42 Klmp dari 309 Klmp)	370.260.000	14,56% (45 Klmp dari 309 Klmp)	407.286.000	14,56% (45 Klmp dari 309 Klmp)	448.014.600		
		Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan		5,90%	5,90%	0	30,04%	300.000.000	30,10%	330.000.000	30,20%	363.000.000	30,30%	399.300.000	30,30%	439.230.000	Sub Bidang Partisipasi Politik Perempuan dan Sosial Budaya serta Lingkungan
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan		6,17%	6,24%	0	36,87%	450.000.000	36,90%	495.000.000	36,95%	544.500.000	37%	598.950.000	37%	658.845.000	Sub Bidang Partisipasi Politik Perempuan dan Sosial Budaya serta Lingkungan

Rencana Strategis BPPKBPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Revisi)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UNIT PELAKSANA
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak				882.312.000		1.302.654.100		1.432.919.510		1.576.211.461		1.733.832.607		1.907.215.868	Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak																Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Sub Bidang Perlindungan Anak
		Persentase Data terlah terkait kesejahteraan anak	Penyusunan dan Harmonisasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	0	100%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	544.500.000	100%	598.950.000	100%	658.845.000	
		Persentase kabupaten/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)		2 Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional	Koordnasi dan fasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 Persentase Data terlah terkait kesejahteraan anak	100%	100%	198.081.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	732.050.000	100%	805.255.000	
				4 Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional	10% (7 dari 70 Anak)	10% (7 dari 70 Anak)	484.231.000	17,14% (13 dari 77 Anak)	532.654.100	15,58% (12 dari 77 Anak)	585.919.510	15,58% (12 dari 77 Anak)	644.511.461	15,58% (12 dari 77 Anak)	708.962.607	15,58% (12 dari 77 Anak)	779.858.868	
				5 Jumlah kabupaten/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)		0	200.000.000	14,28% (1 dari 7 Kab/Kota)	220.000.000	14,28% (1 dari 7 Kab/Kota)	242.000.000	28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)	266.200.000	28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)	292.820.000	28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)	322.102.000	
			Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) anak															Sub Bidang Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UNIT PELAKSANA
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana				1.423.486.000		1.631.000.000		1.794.100.000		1.973.510.000		2.170.861.000		2.387.947.100	Bidang Keluarga Berencana
		Tingkat prevalensi peserta KB aktif																
		Persentase Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I																
		Penyusunan dan Hamonisasi kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana		100%	100%	348.538.000	100%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	544.500.000	100%	598.950.000	100%	658.845.000	Sub Bidang Keluarga Berencana dan Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga
		Peningkatan peserta KB aktif	Tingkat prevalensi peserta KB aktif		81,16%	81,16%	591.563.000	81,51%	650.000.000	81,70%	715.000.000	81,75%	786.500.000	81,80%	865.150.000	81,80%	951.665.000	Sub Bidang Keluarga Berencana
		Peningkatan kualitas keluarga	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I		13,19%	13,19%	483.385.000	11,42%	531.000.000	11,25%	584.100.000	10,95%	642.510.000	10,69%	706.761.000	10,69%	777.437.100	Sub Bidang Pemberdayaan

5.2. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

A. Program Generik

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah meningkatkan pelaksanaan urusan rumah tangga Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dengan kegiatan :

- a. Penyediaan barang urusan rumah tangga, dengan kegiatan :
 - 1) Penyediaan alat tulis kantor
 - 2) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 3) Penyediaan komponen instalasi listrik
 - 4) Penyediaan peralatan kantor
 - 5) Penyediaan alat rumah tangga
 - 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 7) Penyediaan bahan logistik
 - 8) Penyediaan makanan dan minuman
- b. Penyediaan jasa urusan rumah tangga, dengan kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan Jasa administrasi keuangan
 - 4) Penyediaan Jasa kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
 - 6) Rapat-rapat Koordinasi keluar daerah

Sasaran hasil program pelayanan administrasi perkantoran adalah meningkatnya pelaksanaan urusan rumah tangga Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Indikator capaian hasil pada tahun 2017 adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan barang urusan rumah tangga sebanyak 8 jenis
2. Pemenuhan kebutuhan jasa urusan rumah tangga sebanyak 6 jenis

Penyediaan Barang dan Jasa Urusan Rumah Tangga

Hasil : Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa urusan rumah tangga

Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa urusan rumah tangga sebanyak :

- a. 8 jenis barang urusan rumah tangga (alat tulis kantor, barang cetakan/penggandaan, komponen instalasi listrik, peralatan kantor, alat rumah tangga, bahan bacaan/peraturan perundang-undangan, bahan logistic, bahan makanan/minuman).
- b. 6 jenis jasa urusan rumah tangga (jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air/listrik, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Rapat-rapat Koordinasi keluar daerah).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dengan kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang dibagi menjadi sub kegiatan :

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan mobil jabatan
- c. Pengadaan kendaraan dinas/Operasional
- d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- e. Pengadaan meubelair
- f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan
- h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- i. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- k. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Sasaran hasil program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

Indikator capaian hasil pada tahun 2017 adalah : Pemenuhan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 2 jenis (gedung dan kendaraan dinas)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil : Pemenuhan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah Terpenuhinya kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 2 jenis sarana dan prasarana (gedung dan kendaraan dinas)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah meningkatkan disiplin aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dengan kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur, dibagi menjadi sub kegiatan :

- a. Pengadaan mesin/kartu absensi
- b. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- c. Pengadaan pakaian kerja lapangan
- d. Pengadaan pakaian KORPRI
- e. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Sasaran hasil program peningkatan disiplin aparatur adalah meningkatnya disiplin aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

Indikator capaian hasil pada tahun 2017 adalah : Pemenuhan kebutuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil : Pemenuhan kebutuhan peningkatan disiplin aparatur

Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah Terpenuhinya kebutuhan peningkatan disiplin aparatur sebanyak 2 jenis fasilitas (mesin absensi dan pakaian dinas)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dengan kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dibagi menjadi sub kegiatan :

- a. Pembinaan Administrasi Pegawai
- b. Penyusunan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
- c. Pendidikan dan pelatihan formal
- d. Sosialisasi Undang Undang dan Peraturan
- e. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Sasaran hasil program peningkatan sumber daya aparatur adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

Indikator capaian hasil pada tahun 2017 adalah : Pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil : Pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebanyak 2 jenis pembinaan kapasitas (Pendidikan/Pelatihan dan Bimbingan Teknis)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan adalah meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Peningkatan pengembangan

system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dibagi menjadi sub kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
- b. Laporan Neraca
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan/CALK
- d. Pembinaan Pengelola Administrasi Keuangan dan barang milik negara
- e. Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Perempuan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) APBN yang dilengkapi dengan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
 - 2) Penyusunan Laporan Konsolidasi kegiatan dana dekonsentrasi
- f. Pembinaan Administrasi Kepegawaian.
- g. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
- h. Perencanaan dan Penganggaran Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - 2) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
 - 3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) APBD yang dilengkapi dengan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
 - 4) Penyusunan Dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
 - 5) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
 - 6) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - 7) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- i. Monitoring dan Evaluasi, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - 2) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
 - 3) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Sasaran hasil program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator capaian hasil pada tahun 2017 adalah : meningkatnya kualitas system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil : Meningkatnya kualitas system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan sebanyak 14 dokumen.

6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya

Tujuan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya adalah meningkatkan kualitas manajemen yang akuntabel dan terintegrasi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dengan kegiatan:

- a. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Rapat Koordinasi program pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak
 - 2) Penyusunan struktur organisasi dan uraian tugas.

a. Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

Hasil : Tersusunnya dokumen kebijakan pelaksanaan teknis pembangunan pemberdayaan perempuan

Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah jumlah dokumen kebijakan pelaksanaan tugas teknis badan sebanyak 2 dokumen (Kesepakatan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas)

B. PROGRAM TEKNIS

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

Tujuan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan lembaga masyarakat adalah mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dengan sasaran :

- a. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dengan kegiatan kegiatan :
 - 1) Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
 - 2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender
 - 3) TOT Gender
 - 4) Fasilitasi PPRG yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
- b. Penyediaan Data Terpilah, dengan kegiatan :
 - 1) Pengembangan Sistem Informasi Gender
 - 2) Penyusunan buku profil gender
 - 3) Fasilitasi Penyediaan Data Terpilah yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
- c. Penguatan organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Penguatan organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
 - 2) Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan
 - 3) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) bagi institusi media massa
 - 4) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

5) Peningkatan Kapasitas lembaga masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Sasaran hasil program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan lembaga masyarakat adalah Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) Dalam Pembangunan Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah :

- a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 55,81% (24 dari 43 SKPD)
- b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 23,2 % (10 dari 43 SKPD) yaitu : BPPKBPA, Diknas, Dinkes, Dinsos, Disnakertans, BKD, Dinas Koperasi & UKM, Dispora, DPRD, Disperindag, dan 7 Instansi Vertikal yaitu : Kemen PP PA, Polda, Kemenag, BPS, Kantor Hukum & HAM, Kajati, Pengadilan Tinggi/Negeri.
- c. Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berbasis gender 45,45% (15 dari 33 lembaga)

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Tujuan program peningkatan kualitas hidup perempuan untuk mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dengan kegiatan :

- a. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
 - 2) Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia
- b. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
 - 2) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

c. Partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan sub kegiatan :

- 1) Fasilitasi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
- 2) Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
- 3) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

Sasaran hasil program peningkatan kualitas hidup perempuan adalah Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan disegala bidang Pembangunan.

Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah :

- a. Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, peran serta posisi perempuan sebesar 100%
- b. Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA sebesar 14,56% (45 Kelompok dari 309 kelompok)
- c. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 30,30% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan.
- d. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 37% dengan rumusan :
 - Data dari Kabupaten/Kota dengan rumusan : jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
 - Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota.

3. Program Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan program perlindungan perempuan dan perlindungan anak adalah mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan kegiatan :

- a. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
 - 2) Bimbingan teknis implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - 3) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- b. Koordinasi dan fasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
 - 2) Pembinaan partisipasi hak anak
 - 3) Penyusunan buku profil kesejahteraan perlindungan anak
- c. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
 - 2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus

Sasaran hasil program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.

Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah :

- a. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%.
- b. Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak sebesar 100%
- c. Persentase Data terpilah terkait kesejahteraan anak sebesar 100%.
- d. Persentase kabupaten/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA) sebesar 28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)
- e. Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional sebesar 15,58% (12 dari 77 anak)

4. Program Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana

Tujuan program pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana adalah mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana dengan kegiatan :

- a. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
 - 2) Pembinaan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga
- b. Peningkatan peserta Keluarga Berencana aktif, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Peningkatan peserta Keluarga Berencana aktif yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
 - 2) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
 - 3) Pelayanan KIE tentang KB
 - 4) Pembinaan dan pelayanan keluarga berencana Muspida
 - 5) Peningkatan KIE program Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK)
- c. Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga yang meliputi : Sosialisasi, Advokasi, Rapat Koordinasi, Pembinaan
 - 2) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Sasaran hasil program pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana adalah Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana.

Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah :

- a. Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana sebesar 100%.
- b. Tingkat prevalensi peserta KB aktif sebanyak 81,8% dengan rumusan :
 - Data dari Kab/Kota dengan rumusan : jumlah peserta program KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS)
 - Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota.
- c. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 sebanyak 10,69% dengan rumusan :
 - Data dari Kab/Kota dengan rumusan : jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dibagi dengan jumlah keluarga.
 - Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota.

5.3. Program Lintas Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung

Target capaian pembangunan pemberdayaan perempuan telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, Kementerian maupun Daerah. Pembangunan pemberdayaan perempuan dapat mencapai target yang telah ditetapkan apabila diselenggarakan secara terarah, sinergi, dan berkesinambungan oleh semua pelaku pembangunan. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks karena perubahan yang begitu cepat dan sering tak terduga, di tingkat global berbagai isu strategis muncul seperti perubahan iklim, pemanasan global, krisis energi, politik, diskriminalisasi dan globalisasi.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu disusun program-program pemberdayaan perempuan dan koordinasi serta kerjasama antar instansi maupun *stakeholder* yang terkait didasarkan atas kondisi kebutuhan suatu daerah termasuk

melibatkan peran serta masyarakat dalam menjalankan program-program pemberdayaan perempuan.

Dalam melaksanakan tupoksi kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dalam hal : penyiapan formasi kebutuhan pegawai, urusan kepangkatan, urusan tata usaha kepegawaian, dan perizinan untuk pegawai yang mengikuti tugas belajar atau izin belajar pegawai yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prov. Kep. Bangka Belitung pada tahun 2007 telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), dalam rangka penanganan kasus-kasus dan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan anak, salah satunya penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam upaya penanganan KDRT juga, maka pemerintah juga menjalin perjanjian kerjasama tertulis antara BPPKBPA dengan Biro Bina Mitra POLDA Prov. Kep. Bangka Belitung tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan dan pencegahan terhadap KDRT dan trafficking yang semakin kompleks dan melibatkan antar daerah dan antar pulau, maka diperlukan kerja sama dengan daerah lain, Berdasarkan data yang ada sebagian tindak pidana trafficking berasal dari provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, maka pada tahun 2010 pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang berisi tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.

Di bidang Keluarga Berencana, kerjasama lintas sector dilaksanakan dengan BKKBN dalam bentuk kerjasama pemberdayaan dan peningkatan ketahanan masyarakat melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Selain itu juga kerjasama dengan Badan Koordinasi Remaja Masjid Indonesia (BKRFMI) untuk sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, kependudukan dan keluarga berencana. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya peningkatan pendapatan keluarga, tercapainya tingkat kesejahteraan keluarga, dan tercapainya tingkat pengetahuan tentang program kependudukan dan keluarga berencana.

Salah satu prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017 adalah pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Indikator pendukung penanggulangan kemiskinan dari SKPD BPPKBPA adalah Indeks Pembangunan Gender. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan peumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan PA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melaksanakan kerjasama lintas sektor dan dengan instansi terkait dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk melakukan koordinasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

5.4. Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

Urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan merupakan urusan wajib. Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan membutuhkan dana yang proporsional, pendanaan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sejauh ini alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat event nasional, sehingga belum mengakomodir kegiatan-kegiatan lainnya. Selain besar anggaran pengalokasian anggaran juga merupakan hal yang penting karena menyangkut efisiensi dan efektifitas terhadap pelaksana kegiatan program-program, bagian perencanaan dan keuangan harus dapat menentukan distribusi proporsi anggaran terhadap program yang diperlukan berdasarkan skala prioritas rendah yang rendah capaiannya.